Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.394

Kebijakan *Food Security* : Arah Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan Pemerintah Indonesia

Nudia Indah P[1], Aprilia Setyaningsih[2]

[1,2] Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Ponorogo.

[2]apriliasetya20@gmail.com

Abstract

Food is the initial priority need of humans as living things. While food security is defined as meeting the needs continuously. Because food security is a guarantee for living things to work productively. This paper aims to examine: 1. The direction of policy, and 2. food security strategies. This paper is carried out from various literature studies from the results of research related to the aspects of the discussion. The results show that 1. The direction of food security policy so far certainly wants to realize food independence from the household to the national level and 2. Indonesia's food security strategy is expected to be able to compete in the future so that an active and responsive government with food security is needed.

Keywords: *Food security policy, Production policy, Strategy policy.*

Abstrak

Pangan ialah kebutuhan awal prioritas manusia sebagai makhluk hidup. Sedangkan ketahanan pangan diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan secara menerus. Sebab ketahanan pangan ialah jaminan bagi makhluk hidup untuk bekerja secacara produktif. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji arah kebijakan dan strategi ketahanan pangan. Tulisan ini dilakukan dari berbagai studi pustaka dari hasil penelitian yang terkait dengan aspek pembahasan. Hasilnya menunjukkan bahwa 1. Arah kebijakan ketahanan pangan selama ini tentunya ingin mewujudkan kemandirian pangan dari tingkat rumah tangga hingga nasional dan 2. Strategi ketahanan pangan diharapkan indonesia mampu bersaing dimasa depan sehingga diperlukan pemerintah yang aktif dan tanggap dengan masalah ketahanan pangan.

Kata kunci: Kebijakan ketahanan pangan, Kebijakan produksi, Kebijakan strategi.

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.394

PENDAHULUAN

Pangan artinya kebutuhan sehari-hari manusia atau bisa disebut *(basic need)* manusia. Sesuai UU pangan (1996) ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan bagi rumah tangga tidak hanya jumlah yang cukup tetapi juga harus aman, bermutu, bergizi dan beragam. Dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Secara lebih aktual kondisi ketahanan pangan sangat berpacu pada komitmen pemerintah.

Peningkatan ketahanan pangan kearah yang lebih maju tentunya menjadi aspek prioritas pembangunan agar mampu bersaing dalam perekonomian nasional. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi. Selain itu ketahanan pangan mencakup aspek rumah tangga dan tingkat nasional (Anonimous,1999).

Dalam pengertian kebijakan operasional pembangunan departemen pertanian menterjemahkan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas. Selain itu produksi ketahanan pangan harus mampu bagi masyarakat untuk menjangkau bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi.

Dalam tingkat rumah tangga berdasarkan kondisi tersebut adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain itu ketersediaan pangan harus mengacu pada tingkat daerah yang selanjutnya pada ketersediaan pangan nasional. Ketahanan pangan yang utama makanan pokok juga tidak terlepas dari unsur-unsur seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, karena rata-rata penduduk indonesia atau sebagian lain mengkonsumsi dari beras, jagung dan terigu. Dengan demikian ketahanan pangan menjadi penting bagi unsur-unsur politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pemerintah indonesia juga sudah seharusnya meningkatkan sektor pertanian. Hal ini karena indonesia memiliki potensi SDA yang cukup melimpah jika bisa dimanfaatkan dengan baik apalagi dalam sektor pertanian ini bisa mendongkrak dalam masalah ketahanan pangan.

METODE

Sumber data menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan dari berbagai hasil penelitian dan mereviewnya dari beberapa jurnal.Analisis data berupa menganalis berbagai jurnal yang ada.

PEMBAHASAN

Arah Kebijakan

Arah pertumbuhan pangan akan selalu meningkat ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk. Sementara pemanfaatan sumber daya alam belum terlaksana secara baik, jika ini terus-menerus terjadi maka akan menimbulkan impor. Sehingga harus diarahkan menjadi kemandirian pangan untuk ketahanan pangan berkelanjutan

Dengan arahan tersebut harus memperhatikan:

1. Sisi ketersediaan: kualitas SDA dan sumber daya air, memprioritaskan produksi dalam negeri, pengelolaan cadangan makanan per daerah yang seharusnya dilakukan
2. Sisi distribusi: perbaikan ditribusi barang secara cermat, menghapus peraturan daerah yang membuat ketahanan pangan antar daerah tidak terlaksana dan
3. Sisi konsumsi : kebutuhan gizi yang seimbang harus terpenuhi dalam rumah tangga , pemenuhan

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.394

pangan yang cukup bagi masyarakat dan pembantuan pangan bagi orang miskin, ibu hamil dan gizi buruk.

Arahan yang lain yang mungkin dilakukan yaitu dengan UU pangan dengan kreativitas dalam produksi pangan dengan mengandalkan potensi alam, manusia, sosial dan kearifan lokal dengan ini maka komoditas yang harus dikembangkan ialah :

1. Komoditas pasar ekspor tidak harus swasembada pangan
2. Dengan pemanfaatan teknologi yang profesional mampu merubah ketahanan pangan menjadi lebih baik
3. Jenis pangan yang harus seluruhnya diimpor sebab kebutuhan negeri

Dengan demikian arahan yang terdapat didalam UU pangan untuk mencapai : ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Implementasi arah kebijakan tersebut tentunya perlu dukungan kebijakan lain antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dalam mengelola ketahanan pangan serta kerawanan pangan
2. Meningkatkan penelitian
3. Meningkatkan kelembagaan ketahanan pangan dan
4. Meningkatkan kerjasama internasional

Strategi Pangan

Strategi kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan sudah ada sebelum zaman kolonial ,namun hingga saat ini pemerintah belum menyebut secara gamblang tentang konsep ketahanan pangan, menurut simatupang (1999) bahwa pendekatan ketersediaan pangan pada orde baru mempunyai 3 asumsi kelemahan : 1. Kelangkaan pangan secara cepat ini menimbulkan kenaikan harga 2. Harga pangan memadai dapat menjamin semua orang tercukupi 3. Produksi pangan swasembada untuk ketahanan pangan dalam negeri.

Kelemahan tersebut sejatinya tugas pokok pemerintah karena program yang dijalankam pemerintah selama ini tidak sesuai dengan kondisi ketahanan pangan setiap daerah yang ada di wilayah indonesia. Berdasarkan hal tersebut strategi yang layak untuk ketahanan pangan ialah perencanaan demi keberlangsungan masa depan bukan hanya pemerintah saja tetapi masyarakat juga harus berpartisipasi melalui kelembagaan desa. Isu sentral kebijakan ketahanan pangan yaitu untuk mendapatkan hasil pangan *(food entitlement)* kepada masayrakat sekitar lewat pasar online atau pasar tradisional, Pendapatan panen disalurkan oleh produksi untuk dijual kembali kepada kosumen atau masyrakat hal ini dapat dilihat kondisi ekonomi di sekitar yaitu:

1. Pendapatan yang diperoleh masyarakat kurang maksimal sehingga banyak yang tidak mampu membeli bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari
2. Keterbatasan barang dan harga sehingga masyakat tidak mampu mencukupi karena harga terlalu tinggi.

Strategi kebijakan pangan ini memberikan dorongan untuk mendapatkan pertumbuhan sektor harga pangan yang dilakukan oleh pemerintah supaya harga sesuai yang inginkan konsumen.

Di Indonesia ada penetapan strategi yang dilakukan pemerintah meliputi :

1. Pemerintah membuat rancangan yang baru untuk memudahkan

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.394

dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh konsumen.

2. Pemerintah mengadakan iklan investasi pertanian diberbagai wilayah terutama di kawasan terpencil.
3. Pembangunan pasar desa di wilayah desa utamanya para petani untuk menjual hasil panen yang telah dipanen.

Strategi lain yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah pemanfaatan sumber daya hayati pangan sebagai pendongkrak ketahanan pangan, disamping itu Indonesia adalah kawasan inti dari ekonomi pertumbuhan. Berikut ini mungkin jenis-jenis keanekaragaman sumber daya hayati meskipun terkesan sangat lokal ini mempunyai peluang dalam mewujudkan ketahanan pangan antara lain :

1. Ubi – ubian

Telah ada sebanyak 300 yang telah dibudidayakan dan berbagai macam bentuk dan ukuran.

2. Kacang – kacangan

Di indonesia mempunyai nilai yang tinggi bisa disebut dengan kecipir.

3. Buah – buahan

Di indonesia juga terdapat berbagai macam buah-buahan seperti salak, mangga, apel, manggis, durian dan lainnya .

Yang tak kalah penting menyangkut tentang ketahanan pangan strategi lain agar mampu bersaing dalam masa depan sehingga dapat mewarisi anak cucu bangsa. Strategi itu ialah perlindungan dan pengendalian konversi lahan pertanian mungkin dapat ditempuh melalu tiga cara yaitu :

1. Meminimalisir pengakibatan konversi mengdapatkan melalui penawaran dan penawaran, dan permintaan dapat ditempuh melalui :
   - Pajak tanah yang bersifat progresif.
   - Meningkatkan lahan sebagai non pertanian
   - Penghematan lahan sebagai perbuatan rumah, indusri, dan perdagangan.
2. Konversi lahan :
   - Meminimkan lahan sawah, menyaingi tenaga kerja pertanian tinggi dan fungsi lingkungan.
   - Meminimkan luas lahan yang dapat dimanfatkan setiap kota kemampuan pangan secara mandiri.
   - Membuat lahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan abadi.
3. Instrumen pengendalian konversi lahan yuridis dan non yuridis :
   - Yuridis ialah peraturan undang-undang yang di dalamnya disertai dengan sanksi yang mengikat.
   - RT RW (Rencana tata ruang wilayah).

KESIMPULAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia dan ketahanan pangan merupakan ketersediaan pangan yang dibutukhan manusiaa untuk mencukupi ketersediaan pangan. Oleh karena itu di indonesia diterapkan ketahanan pangan untuk melindungi berbagai jenis hasil panen dari petani. Selain itu pemerintah harus memeperhatikan arah dalam melakuan kebijakan antara lain:

1. Sisi ketersediaan

SDA dan sumber daya air, memprioritaskan produksi dalam negeri, pengelolaan cadangan

makanan per daerah yang seharusmya dilakukan.

2. Sisi distribusi
   Perbaikan ditribusi barang secara cermat, menghapus peraturan daerah yang membuat ketahanan pangan antar daerah tidak terlaksana.
3. Sisi konsumsi
   Kebutuhan gizi yang seimbang harus terpenuhi dalam rumah tangga pemenuhan pangan yang cukup bagi masyarakat dan pembantuan pangan bagi orang miskin dan ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Ketahanan Pangan. 2014. Badan Ketahanan Pangan. (2014). Badan Ketahanan Pangan. 1–74.

B., Pengembangan, D. A. N., & Pertanian, K. 2015. Kajian ketahanan pangan nasional dalam perspektif perdagangan regional dan global. 1–19.

Dewan Ketahanan Pangan. 2009. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Gizi Dan Pangan, 1(1), 57–63.

Kustiari, R., Sosial, P., Dan, E., Pertanian, K., Penelitian, B., Pengembangan, D. A. N., & Pertanian, K. 2015. Kajian ketahanan pangan nasional dalam perspektif perdagangan regional dan global. 1–19.

Lantarsih, R., Widodo, S., Darwanto, D. H., Lestari, S. B., & Paramita, S. 2016. Sistem Ketahanan Pangan Nasional: Kontribusi Ketersediaan dan Konsumsi Energi serta Optimalisasi Distribusi Beras. Analisis Kebijakan Pertanian, 9(1), 33. https://doi.org/10.21082/akp.v9n1.2011.33-51

Maluku, P. D. I., & Noto, A. 2010. Prospek dan strategi pengembangan jagung untuk mendukung ketahanan pangan di maluku. 97232(2).

Mewa Ariani. 2004. Penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, 1999(70), 23–37.

Nainggolan, K. 2002. Program Akselerasi Pemantapan Ketahanan Pangan. 114–122.

Pertanian, J. T., Pertanian, F., & Bengkulu, U. 2012. Pengembangan Diversifikasi Produk Pangan Olahan Lokal Bengkulu untuk Menunjang Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Jurnal Agritech Fakultas Teknologi Pertanian UGM, 30(4). https://doi.org/10.22146/agritech.9717

Pangan, Dari, Klaten, Tengah, & Adam, n.d.)Pangan, K., Dari, P., Klaten, K., Tengah, J., & Adam, L. (n.d.). THE INSTITUTIONAL ISSUES ON THE DEVELOPMENT OF FOOD SECURITY : LESSONS LEARNED FROM KLATEN REGENCY , CENTRAL JAVA Iss. VII(2).

Prabowo, R. 2010. Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. Mediagro, 6(2), 62–73.

Priantoro, Priyotamtama, & Handoyo, n.d.)Priantoro, A. T., Priyotamtama, P. W., & Handoyo, D. (n.d.). Gunung

Kidul Secara Berkelanjutan. 29–42.

Saliem, H. P., & Ariani, M. 2016. Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 20(1), 12. https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24

STRATEGI PENGUATAN LUMBUNG PANGAN DESA DALAM MENUN- JANG PEMENUHAN KETAHANAN PANGAN Mohamad. (n.d.). Mohamad Ikbal Bahua ABSTRAK. 16(02), 117–124.

Simatupang, P. 2016. Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 25(1), 1. https://doi.org/10.21082/fae.v25n1.2007.1-18

Zuraida, R. 2010. Usaha tani Padi dan Jagung Manis pada Lahan Tadah Hujan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan (Kasus di Kec . Landasan Ulin Kotamadya Banjarbaru).